

KEBIJAKAN ANGGARAN COVID-19 DI JATIM MINIM PARTISIPASI PUBLIK

Kamis, 18 Februari 2021 - Fikri Mustofa

Infoanggaran.com, Jakarta – Kebijakan anggaran penanganan Covid-19 di Jawa Timur terbilang buruk. Dari 37 kabupaten/kota di Jatim, mayoritas daerah tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

“Bahkan beberapa daerah tidak melibatkan anggota legislatif pada perencanaan dan penganggaran Covid-19,” ujar peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jatim Habib M dalam diskusi publik bertajuk “Tata Kelola Anggaran Covid-19 di Jawa Timur” secara virtual, Kamis (18/2/2021).

Padaahal, kata Habib, partisipasi masyarakat punya peranan penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Berbagai permasalahan penanganan Covid-19 yang muncul - terutama penyaluran bantuan sosial di wilayah Jatim, tak lepas akibat “minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kebijakan.”

Atas dasar itu, Habib menyarankan agar pemerintah daerah di Jatim meningkatkan partisipasi publik dalam penanganan Covid-19, khususnya kebijakan anggaran Covid-19.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jatim Agus Muttaqin menambahkan, penanganan Covid-19 di Jatim masih bermasalah seperti tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, hingga permintaan sejumlah uang.

“Ada 97 laporan dugaan maladministrasi penanganan Covid-19 yang diterima ORI Jawa Timur,” terang Agus.

Dari sisi substansi, Agus menuturkan, laporan tersebut didominasi dugaan maladministrasi penyaluran bantuan sosial. “Terutama masalah data bansos tidak akurat. Karena kita tahu selama ini data penerima bansos pakai data yang lama,” sebutnya.

Dugaan maladministrasi pelayanan kesehatan juga cukup banyak. Pokok laporan yang diadukan berkenaan dengan akses mendapatkan *tracing swab* PCR yang sulit, hasil tes Swab PCR yang sangat lama, hingga permintaan biaya perawatan pasien positif Covid-19.